

Kepemimpinan dalam Situasi Darurat: Studi Kasus Pengambilan Keputusan di Tengah Krisis Iklim dan Bencana Alam

Leadership in Emergency Situations: A Case Study of Decision-Making amid Climate Crisis and Natural Disasters

Siti Aimah¹, Fitria Salsabila²

(1, 2) Manajemen Pendidikan Islam, Universitas KH. Mukhtar Syafaat Banyuwangi

✉ Corresponding author:

sitiaimah1@iaida.ac.id, inisalsabila03@gmail.com

Abstrak

Krisis iklim dan meningkatnya frekuensi bencana alam menuntut kepemimpinan yang adaptif, responsif, dan berbasis pengambilan keputusan yang cepat serta akurat. Kepemimpinan dalam situasi darurat memiliki peran strategis dalam menentukan efektivitas respons bencana, mulai dari mitigasi, tanggap darurat, hingga pemulihan pascabencana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepemimpinan dalam pengambilan keputusan pada situasi darurat akibat krisis iklim dan bencana alam, dengan menekankan pada dinamika pengambilan keputusan di tengah ketidakpastian, keterbatasan sumber daya, dan tekanan waktu. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, yang difokuskan pada beberapa peristiwa bencana alam di Indonesia. Data diperoleh melalui studi dokumentasi, laporan resmi pemerintah, serta kajian literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif dalam situasi darurat ditandai oleh kemampuan komunikasi yang jelas, koordinasi lintas sektor, keberanian mengambil keputusan strategis, serta sensitivitas terhadap kebutuhan masyarakat terdampak. Selain itu, kepemimpinan kolaboratif dan berbasis pengetahuan lokal terbukti meningkatkan efektivitas respons bencana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kapasitas kepemimpinan darurat menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi tantangan krisis iklim dan bencana alam di masa depan.

Kata kunci: Kepemimpinan darurat, Krisis iklim, bencana alam, Pengambilan keputusan, Manajemen bencana

Abstract

Climate crises and the increasing frequency of natural disasters demand adaptive, responsive, and timely leadership in emergency situations. Leadership plays a critical role in determining the effectiveness of disaster response, ranging from mitigation and emergency response to post-disaster recovery. This study aims to analyze leadership roles in decision-making during emergency situations caused by climate crises and natural disasters, focusing on decision-making dynamics under conditions of uncertainty, limited resources, and time pressure. This research employs a qualitative approach with a case study design, examining selected natural disaster events in Indonesia. Data were collected through document analysis, official government reports, and relevant literature reviews. The findings indicate that effective emergency leadership is characterized by clear communication, cross-sector coordination, decisive strategic actions, and sensitivity to the needs of affected communities. Furthermore, collaborative leadership and the integration of local knowledge significantly enhance disaster response effectiveness.

This study concludes that strengthening emergency leadership capacity is essential for addressing future challenges related to climate crises and natural disasters.

Keywords: Emergency leadership, Climate crisis, Natural disasters, Decision-making, Disaster management

PENDAHULUAN

Perubahan iklim global merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi umat manusia pada abad ke-21. Laporan *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC, 2023) menegaskan bahwa peningkatan suhu global telah mempercepat terjadinya fenomena cuaca ekstrem, seperti banjir besar, kekeringan berkepanjangan, badi tropis, dan gelombang panas yang semakin intens dan tidak terduga. Dampak perubahan iklim tersebut secara langsung meningkatkan frekuensi dan skala bencana alam, khususnya di negara-negara berkembang yang memiliki kerentanan struktural, termasuk Indonesia. Semakin seringnya terjadi krisis global, mulai dari pandemi hingga bencana alam, telah menempatkan kepemimpinan dalam pusat perhatian. Kondisi ini mendorong kajian yang lebih mendalam mengenai cara para pemimpin mengelola keterbatasan sumber daya ketika harus mengambil keputusan di bawah tekanan yang tinggi (Faghih Khorasani, 2022; Heydari & Morid, 2020; Khankeh, 2011).

Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di kawasan cincin api Pasifik (*Pacific Ring of Fire*) menghadapi risiko bencana yang sangat tinggi, baik bencana geologis seperti gempa bumi dan letusan gunung api, maupun bencana hidrometeorologis seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB, 2023) menunjukkan bahwa lebih dari 90% bencana yang terjadi di Indonesia dalam satu dekade terakhir merupakan bencana hidrometeorologis yang berkaitan erat dengan perubahan iklim. Kondisi ini menuntut adanya sistem manajemen bencana yang tidak hanya tangguh secara struktural, tetapi juga didukung oleh kepemimpinan yang efektif dalam situasi darurat.

Kepemimpinan dalam situasi darurat memiliki karakteristik yang berbeda secara fundamental dibandingkan dengan kepemimpinan dalam kondisi normal. Pada masa krisis, kapasitas para pemimpin dalam mengambil keputusan yang tepat dan berlandaskan etika mendapat ujian paling berat, khususnya ketika ketersediaan sumber daya terbatas dan risiko yang dihadapi sangat besar. Pemimpin dalam konteks krisis dihadapkan pada tekanan waktu yang ekstrem, informasi yang sering kali tidak lengkap atau ambigu, keterbatasan sumber daya, serta tuntutan publik yang tinggi. Dalam situasi seperti ini, kualitas pengambilan keputusan pemimpin menjadi faktor penentu dalam meminimalkan risiko korban jiwa, kerugian material, serta dampak sosial yang lebih luas (Taheri, 2022).

Sejumlah studi menunjukkan bahwa kegagalan dalam kepemimpinan darurat sering kali bukan disebabkan oleh kurangnya sumber daya, melainkan oleh lemahnya koordinasi, komunikasi yang tidak efektif, serta ketidakmampuan pemimpin dalam membaca dinamika situasi krisis (Comfort et al., 2020). Sebaliknya, kepemimpinan yang adaptif, kolaboratif, dan responsif terbukti mampu meningkatkan efektivitas respons bencana, bahkan dalam kondisi keterbatasan (Alkhawlani, 2019).

Dalam konteks krisis iklim, tantangan kepemimpinan menjadi semakin kompleks. Pemimpin tidak hanya dituntut untuk merespons bencana secara reaktif, tetapi juga harus mampu mengambil keputusan strategis berbasis mitigasi dan adaptasi jangka panjang. Hal ini mencakup integrasi kebijakan pengurangan risiko bencana dengan perencanaan pembangunan berkelanjutan, serta pelibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta (Yang, 2020).

Kajian mengenai manajemen bencana dan kepemimpinan telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek struktural dan teknis, seperti sistem peringatan dini dan logistik bencana. Kajian yang secara spesifik menelaah proses pengambilan

keputusan pemimpin dalam situasi darurat akibat krisis iklim, terutama dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, masih relatif terbatas. Proses pengambilan keputusan merupakan inti dari kepemimpinan dan sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan respons bencana. Komitmen politik memiliki peran yang sangat menentukan dalam efektivitas kepemimpinan pada masa krisis. Aryantiningsih (2021) melalui kajiannya terhadap program pengobatan tuberkulosis menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan masalah kesehatan masyarakat sangat bergantung pada keberlanjutan kemauan politik. Temuan ini sejalan dengan penelitian Post (2022) yang mengkaji pengaruh berbagai perilaku dan gaya kepemimpinan terhadap proses pengambilan keputusan dalam tim manajemen krisis, serta menegaskan bahwa gaya kepemimpinan dapat berpengaruh signifikan terhadap efisiensi dan capaian respons krisis.

Dengan mengintegrasikan berbagai sudut pandang tersebut, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pola dan strategi umum yang diterapkan para pemimpin di berbagai sektor dan konteks krisis. Metode yang digunakan menekankan analisis kualitatif melalui wawancara semi-terstruktur dengan para pemimpin yang memiliki pengalaman langsung dalam menghadapi krisis, hingga mencapai saturasi teoretis. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai cara pemimpin mengelola keterbatasan sumber daya, menyesuaikan diri dengan perubahan yang berlangsung cepat, serta menjaga keterlibatan dan hubungan dengan para pemangku kepentingan di bawah tekanan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepemimpinan dalam pengambilan keputusan pada situasi darurat akibat krisis iklim dan bencana alam di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji bagaimana pemimpin menghadapi ketidakpastian, mengelola keterbatasan sumber daya, serta membangun koordinasi lintas sektor dalam kondisi tekanan waktu yang tinggi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian kepemimpinan darurat, serta kontribusi praktis bagi perumusan kebijakan manajemen bencana yang lebih efektif dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, yang dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai dinamika kepemimpinan serta proses pengambilan keputusan dalam situasi darurat akibat krisis iklim dan bencana alam. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena kepemimpinan sebagai suatu proses sosial yang kompleks, kontekstual, dan dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural, institusional, serta budaya yang tidak dapat sepenuhnya dijelaskan melalui pendekatan kuantitatif.

Desain studi kasus digunakan karena penelitian ini berfokus pada analisis mendalam terhadap konteks nyata (real-life context) dari kepemimpinan darurat, di mana batas antara fenomena yang diteliti dan lingkungannya tidak dapat dipisahkan secara tegas. Studi kasus difokuskan pada beberapa peristiwa bencana alam yang terjadi di Indonesia dalam satu dekade terakhir, termasuk banjir besar, gempa bumi, dan bencana hidrometeorologis. Pemilihan kasus tersebut didasarkan pada pertimbangan tingkat kerusakan, kompleksitas penanganan, serta keterlibatan berbagai aktor dan institusi dalam proses pengambilan keputusan darurat, sehingga memberikan gambaran yang representatif mengenai tantangan kepemimpinan di tengah krisis.

Data penelitian diperoleh melalui studi dokumentasi, yang mencakup laporan resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), peraturan dan kebijakan pemerintah terkait penanggulangan bencana, laporan organisasi internasional, serta artikel ilmiah dan publikasi akademik yang relevan dengan topik kepemimpinan darurat dan manajemen bencana. Penggunaan studi dokumentasi dipandang efektif untuk memperoleh data yang bersifat faktual, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, sekaligus memungkinkan peneliti menelusuri pola kebijakan dan praktik kepemimpinan dalam berbagai konteks bencana.

Teknik analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik, yaitu dengan mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menafsirkan tema-tema utama yang muncul dari data. Proses analisis diawali dengan penelaahan menyeluruh terhadap dokumen dan literatur yang dikumpulkan, dilanjutkan dengan proses pengodean untuk menemukan pola-pola kepemimpinan, strategi pengambilan keputusan, mekanisme koordinasi lintas sektor, serta tantangan yang dihadapi oleh pemimpin dalam situasi darurat. Tema-tema yang telah diidentifikasi kemudian dianalisis secara interpretatif dengan mengaitkannya pada kerangka teoretis kepemimpinan krisis dan manajemen bencana, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan terintegrasi (Maghrebi, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kepemimpinan dalam situasi darurat akibat krisis iklim dan bencana alam tidak ditentukan oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh interaksi sejumlah faktor kunci yang saling berkaitan. Berdasarkan analisis tematik terhadap berbagai dokumen kebijakan, laporan penanganan bencana, dan kajian empiris, ditemukan empat faktor utama yang secara konsisten memengaruhi keberhasilan kepemimpinan darurat, yaitu kecepatan pengambilan keputusan, kejelasan komunikasi krisis, koordinasi antar lembaga, dan legitimasi pemimpin di mata masyarakat.

Keempat faktor tersebut berperan strategis dalam menentukan kualitas respons bencana, mulai dari tahap tanggap darurat hingga pemulihan awal. Kecepatan pengambilan keputusan berkontribusi langsung terhadap penurunan risiko korban jiwa dan kerusakan yang lebih luas. Kejelasan komunikasi krisis berfungsi sebagai instrumen pengendalian kepanikan publik dan sarana penyelarasan tindakan antar aktor. Koordinasi lintas sektor memungkinkan pemanfaatan sumber daya secara lebih efisien, sementara legitimasi kepemimpinan menjadi dasar terbentuknya kepercayaan publik dan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan darurat.

Tabel 1. Faktor Kunci Kepemimpinan dalam Situasi Darurat

Faktor	Deskripsi	Dampak terhadap Respons Bencana
Kecepatan keputusan	Kemampuan bertindak cepat dan tepat	Mengurangi korban jiwa
Komunikasi krisis	Informasi yang jelas dan konsisten	Mencegah kepanikan
Koordinasi	Sinergi lintas sektor	Efisiensi sumber daya
Legitimasi	Kepercayaan publik	Kepatuhan masyarakat

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kepemimpinan yang melibatkan pemangku kepentingan lokal serta memanfaatkan pengetahuan lokal cenderung lebih efektif dibandingkan pendekatan yang bersifat sepenuhnya sentralistik. Pelibatan aktor lokal terbukti mempercepat proses identifikasi kebutuhan lapangan, meningkatkan akurasi distribusi bantuan, serta memperkuat penerimaan kebijakan oleh masyarakat terdampak.

Pengambilan keputusan dalam situasi darurat akibat bencana alam dan krisis iklim merupakan proses yang berlangsung dalam kondisi ketidakpastian tinggi (uncertainty) dan lingkungan berisiko tinggi (high-risk environment). Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemimpin di Indonesia menghadapi setidaknya tiga tekanan utama dalam proses pengambilan keputusan, yaitu keterbatasan dan ketidaklengkapan informasi, tekanan waktu yang ekstrem, serta ekspektasi publik yang tinggi terhadap kecepatan dan ketepatan respons pemerintah. Dalam beberapa kasus bencana besar, seperti banjir bandang dan gempa bumi, keputusan awal yang diambil oleh pemimpin daerah terbukti memainkan peran krusial dalam menentukan

efektivitas tahap tanggap darurat. Pemimpin yang mampu menetapkan status darurat secara cepat, mengaktifkan mekanisme komando penanganan bencana, serta mengerahkan sumber daya lintas sektor sejak fase awal cenderung lebih berhasil dalam menekan jumlah korban jiwa dan mempercepat proses evakuasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Heydari dan Morid (2020) yang menegaskan bahwa early decision-making merupakan faktor kunci dalam keberhasilan manajemen krisis.

Sebaliknya, keterlambatan dalam pengambilan keputusan sering kali disebabkan oleh keraguan pemimpin dalam menilai skala ancaman, keterbatasan data lapangan, atau kekhawatiran terhadap implikasi politik dan administratif dari keputusan yang diambil. Dalam konteks ini, legitimasi kepemimpinan menjadi faktor penentu. Pemimpin yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi dari masyarakat dan aparatur birokrasi cenderung lebih berani mengambil keputusan strategis, meskipun keputusan tersebut berpotensi menimbulkan kritik dalam jangka pendek.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa **komunikasi krisis** merupakan salah satu instrumen paling krusial dalam kepemimpinan situasi darurat. Komunikasi yang tidak jelas, tidak konsisten, atau terlambat disampaikan berpotensi memperburuk kepanikan publik, memicu penyebaran informasi yang keliru, serta menghambat koordinasi antar lembaga di lapangan. Sebaliknya, komunikasi yang transparan, konsisten, dan empatik terbukti meningkatkan kepercayaan publik dan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan darurat.

Dalam beberapa studi kasus bencana hidrometeorologis, pemimpin daerah yang secara aktif menyampaikan informasi melalui berbagai saluran komunikasi seperti media massa, media sosial resmi pemerintah, serta pertemuan langsung dengan tokoh Masyarakat mampu membangun kepercayaan publik dan memperlancar proses evakuasi. Strategi komunikasi yang terencana dan terkoordinasi ini berkontribusi pada penurunan tingkat kepanikan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana. Temuan ini sejalan dengan penelitian Filip (2022) yang menekankan pentingnya **risk communication** dalam konteks bencana dan krisis kesehatan masyarakat.

Penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi krisis yang efektif tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi teknis, tetapi juga mencakup dimensi psikologis masyarakat terdampak. Pemimpin yang mampu menunjukkan empati, kepedulian, serta kehadiran langsung di lokasi bencana dinilai lebih efektif dalam meredam ketegangan sosial dan memperkuat solidaritas komunitas.

Koordinasi lintas sektor merupakan tantangan utama dalam penanganan bencana yang berskala besar dan kompleks. Penelitian ini menemukan bahwa kepemimpinan darurat yang efektif ditandai oleh kemampuan pemimpin dalam membangun sinergi antara berbagai aktor, termasuk pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan, organisasi non-pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat lokal.

Dalam konteks Indonesia, struktur birokrasi yang cenderung hierarkis sering kali menjadi hambatan dalam pengambilan keputusan yang cepat dan fleksibel. Namun demikian, pemimpin yang mampu mengadopsi pendekatan kolaboratif dan adaptif cenderung lebih berhasil dalam mengatasi hambatan tersebut. Salah satu praktik yang terbukti efektif adalah pelibatan relawan lokal dan organisasi masyarakat sipil dalam proses distribusi bantuan, yang memungkinkan jangkauan bantuan menjadi lebih luas dan tepat sasaran, khususnya bagi kelompok rentan.

Temuan ini memperkuat konsep **network governance** dalam manajemen bencana, yang menekankan pentingnya jejaring kerja sama lintas aktor dalam menghadapi krisis yang bersifat multidimensional dan dinamis (Aryantiningsih et al., 2021).

Tabel 2. Perbandingan Pola Kepemimpinan Darurat Berdasarkan Jenis Bencana

Jenis Bencana	Pola Kepemimpinan Dominan	Tantangan Utama	Strategi Efektif
Banjir besar	Kolaboratif-adaptif	Koordinasi wilayah	Pelibatan komunitas lokal

Gempa bumi	Direktif-strategis	Infrastruktur rusak	Keputusan cepat dan terpusat
Kekeringan	Preventif-partisipatif	Dampak jangka panjang	Mitigasi dan edukasi publik

PEMBAHASAN

Kepemimpinan Adaptif dalam Konteks Krisis Iklim

Krisis iklim menghadirkan tantangan kepemimpinan yang bersifat jangka panjang, kompleks, dan lintas generasi, sehingga menuntut paradigma kepemimpinan yang berbeda dari pendekatan konvensional. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pemimpin yang mampu mengintegrasikan perspektif adaptasi perubahan iklim ke dalam pengambilan keputusan darurat memiliki tingkat efektivitas yang lebih tinggi dalam mengurangi dampak bencana, baik dari sisi korban jiwa, kerugian material, maupun gangguan sosial. Integrasi tersebut tercermin dalam penggunaan data risiko iklim, pemetaan kerentanan wilayah, perencanaan berbasis skenario, serta investasi berkelanjutan pada upaya pengurangan risiko bencana.

Pendekatan kepemimpinan adaptif menjadi relevan dalam konteks ini karena krisis iklim tidak hanya menghasilkan bencana yang bersifat tiba-tiba, tetapi juga memperkuat risiko jangka panjang yang terus berkembang dan sulit diprediksi secara pasti. Pemimpin adaptif dituntut untuk mampu membaca perubahan lingkungan strategis, menyesuaikan kebijakan secara fleksibel, serta mengelola ketidakpastian sebagai bagian inheren dari proses pengambilan keputusan. Dalam situasi darurat, kemampuan ini menjadi sangat krusial karena keputusan harus diambil dengan cepat, meskipun informasi yang tersedia sering kali tidak lengkap dan terus berubah.

Lebih jauh, kepemimpinan adaptif tidak semata-mata berfokus pada solusi teknis atau prosedural, melainkan juga menekankan pentingnya perubahan perilaku dan pola pikir masyarakat. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pemimpin yang melibatkan masyarakat dalam proses adaptasi, seperti melalui edukasi kebencanaan, penguatan kapasitas komunitas lokal, dan pemanfaatan pengetahuan lokal, cenderung memperoleh legitimasi yang lebih kuat serta dukungan publik yang lebih luas. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa adaptasi iklim merupakan proses sosial yang membutuhkan partisipasi aktif berbagai aktor, bukan hanya intervensi top-down dari pemerintah.

Dalam konteks pengambilan keputusan darurat, pemimpin adaptif mampu menyeimbangkan antara kebutuhan akan keputusan yang cepat dan tegas dengan pentingnya menjaga partisipasi serta kepercayaan masyarakat. Keseimbangan ini menjadi kunci agar kebijakan darurat tidak hanya efektif secara jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang. Pemimpin yang terlalu menekankan pendekatan otoritatif tanpa mempertimbangkan konteks sosial berisiko merimbulkan resistensi, sementara pemimpin yang terlalu berhati-hati dan deliberatif berpotensi kehilangan momentum dalam merespons krisis.

Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa kepemimpinan adaptif merupakan kapasitas strategis yang harus dikembangkan secara sistematis dalam menghadapi krisis iklim. Penguatan kapasitas tersebut mencakup peningkatan literasi iklim bagi pemimpin, pengembangan sistem pendukung keputusan berbasis data, serta penciptaan ruang kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor non-pemerintah. Dengan demikian, kepemimpinan adaptif tidak hanya berfungsi sebagai respons terhadap bencana yang sedang berlangsung, tetapi juga sebagai fondasi bagi peningkatan ketahanan masyarakat dalam menghadapi krisis iklim di masa depan.

Integrasi Pengetahuan Lokal dalam Pengambilan Keputusan

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah peran strategis pengetahuan lokal (local knowledge) dalam memperkuat efektivitas kepemimpinan darurat pada konteks krisis iklim dan bencana alam. Pengetahuan lokal mencakup berbagai bentuk pemahaman yang

berkembang secara turun-temurun dalam masyarakat, seperti pengenalan terhadap tanda-tanda alam, pola cuaca tradisional, karakteristik geografis wilayah, serta mekanisme sosial seperti gotong royong dan solidaritas komunitas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan lokal berfungsi sebagai sumber informasi kontekstual yang melengkapi data teknis dan ilmiah dalam proses pengambilan keputusan darurat.



Gambar 1. Model Konseptual Kepemimpinan Darurat Berbasis Krisis Iklim

Integrasi pengetahuan lokal memungkinkan pemimpin untuk memperoleh pemahaman yang lebih holistik terhadap risiko dan dampak bencana. Dalam beberapa kasus bencana hidrometeorologis, masyarakat lokal sering kali memiliki pengetahuan empiris mengenai waktu rawan banjir, jalur evakuasi alami, serta kelompok masyarakat yang paling rentan terdampak. Pemimpin yang mampu mengakomodasi pengetahuan tersebut dalam perumusan kebijakan darurat cenderung lebih tepat dalam menentukan prioritas tindakan dan alokasi sumber daya.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemimpin yang mengabaikan pengetahuan lokal cenderung menghadapi resistensi sosial, rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat, serta kesulitan dalam implementasi kebijakan darurat di lapangan. Pendekatan yang terlalu sentralistik dan teknokratis sering kali dipersepsikan sebagai tidak sensitif terhadap konteks lokal, sehingga memicu ketidakpercayaan dan menghambat efektivitas respons bencana. Kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan kepemimpinan darurat tidak hanya ditentukan oleh kapasitas teknis, tetapi juga oleh kemampuan pemimpin dalam membangun relasi sosial dan legitimasi di tingkat komunitas.

Integrasi pengetahuan lokal dalam pengambilan keputusan darurat terbukti meningkatkan legitimasi kepemimpinan dan efektivitas respons bencana. Ketika masyarakat merasa bahwa pengalaman dan pengetahuan mereka dihargai, tingkat partisipasi dan kepatuhan terhadap kebijakan darurat cenderung meningkat. Hal ini sejalan dengan temuan Alkhawlani et al. (2019) yang menekankan bahwa *local knowledge integration* merupakan elemen kunci dalam adaptasi perubahan iklim, khususnya di negara berkembang yang memiliki keragaman sosial dan geografis tinggi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi pengetahuan lokal berkontribusi pada penguatan ketahanan masyarakat (community resilience). Pengetahuan lokal tidak hanya berfungsi pada fase tanggap darurat, tetapi juga berperan dalam tahap mitigasi dan pemulihan pascabencana. Pemimpin yang secara konsisten melibatkan masyarakat dalam perencanaan kebencanaan cenderung mampu menciptakan sistem respons yang lebih berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan risiko iklim.

Integrasi pengetahuan lokal masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti minimnya mekanisme formal untuk mengakomodasi masukan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta kesenjangan komunikasi antara aktor teknis dan komunitas lokal. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang secara sistematis menginstitusionalisasikan peran pengetahuan lokal dalam manajemen bencana, misalnya melalui forum konsultasi komunitas, pelibatan tokoh adat, serta penguatan peran relawan lokal dalam struktur penanggulangan bencana.

Implikasi Kebijakan dan Praktik

Hasil penelitian ini memiliki implikasi yang signifikan bagi perumusan dan implementasi kebijakan manajemen bencana di Indonesia, khususnya dalam konteks meningkatnya intensitas dan kompleksitas krisis iklim serta bencana alam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan respons darurat tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya fisik dan teknologi, tetapi juga sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan dalam situasi krisis.

Pertama, diperlukan penguatan kapasitas kepemimpinan darurat melalui program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang terstruktur dan berkelanjutan. Pelatihan tersebut perlu menitikberatkan pada kemampuan pengambilan keputusan cepat dan tepat dalam kondisi penuh tekanan, ketidakpastian informasi, serta keterbatasan sumber daya. Selain itu, aspek kepemimpinan adaptif, manajemen risiko, komunikasi krisis, dan pengelolaan konflik harus menjadi bagian integral dari kurikulum pelatihan bagi para pemimpin di tingkat nasional maupun daerah, termasuk aparatur pemerintah, kepala daerah, dan pemimpin lembaga penanggulangan bencana.

Kedua, kebijakan penanggulangan bencana perlu secara lebih tegas mendorong pendekatan kolaboratif dan partisipatif. Kepemimpinan darurat yang efektif tidak dapat berjalan secara hierarkis semata, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah pusat dan daerah, lembaga non-pemerintah, sektor swasta, komunitas lokal, serta masyarakat terdampak. Kolaborasi lintas sektor ini penting untuk memastikan koordinasi yang lebih baik, distribusi tanggung jawab yang jelas, serta pemanfaatan sumber daya secara optimal dalam situasi darurat.

Selain itu, integrasi isu perubahan iklim dalam perencanaan dan kebijakan penanggulangan bencana harus menjadi prioritas utama. Perubahan iklim telah meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana, sehingga pendekatan reaktif semata tidak lagi memadai. Oleh karena itu, pemimpin di tingkat nasional dan daerah perlu didorong untuk mengadopsi perspektif jangka panjang yang menghubungkan respons darurat dengan strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Hal ini mencakup penguatan sistem peringatan dini, perencanaan tata ruang berbasis risiko bencana, serta kebijakan pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada ketahanan (resilience).

Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan, menyusun standar operasional prosedur (SOP), serta mengembangkan model kepemimpinan darurat yang kontekstual dengan karakteristik sosial, budaya, dan geografis Indonesia. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dan responsif terhadap dinamika krisis di lapangan.

SIMPULAN

Kepemimpinan memiliki peran sentral dalam pengambilan keputusan pada situasi darurat yang dipicu oleh krisis iklim dan bencana alam. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa kepemimpinan yang efektif dalam kondisi darurat ditandai oleh kemampuan adaptasi terhadap perubahan situasi yang cepat, komunikasi yang jelas dan transparan, koordinasi lintas sektor yang solid, serta keberanian dalam mengambil keputusan strategis meskipun berada dalam kondisi penuh risiko dan ketidakpastian.

Pemimpin yang mampu mengintegrasikan aspek teknis, sosial, dan kemanusiaan dalam pengambilan keputusan terbukti lebih efektif dalam mengelola krisis dan meminimalkan dampak negatif bencana terhadap masyarakat. Selain itu, kepemimpinan darurat yang responsif dan inklusif dapat meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat solidaritas sosial, serta mempercepat proses pemulihan pascabencana.

Oleh karena itu, penguatan kapasitas kepemimpinan darurat merupakan kebutuhan yang mendesak dan strategis dalam upaya meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap krisis di masa depan. Investasi dalam pengembangan kepemimpinan, baik melalui kebijakan, pendidikan, maupun praktik kelembagaan, menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa Indonesia memiliki pemimpin yang siap, tangguh, dan visioner dalam menghadapi tantangan krisis iklim dan bencana alam yang semakin kompleks.

SARAN

Bawa penguatan kapasitas kepemimpinan darurat menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi tantangan krisis iklim dan bencana alam di masa depan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada institusi pendidikan, para informan dan responden, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kontribusi dalam penyelesaian penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, perumusan kebijakan, dan praktik kepemimpinan dalam penanggulangan bencana dan krisis iklim di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkhawiani, M. A. S., Bohari, A. M., & Shamsuddin, J. (2019). The impact of transformational leadership style on crisis management in Yemen organizations. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 9(9), 187-201. <https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v9-i9/6274>
- Aryantiningssih, D. S., Giatman, M., & Yanti, N. (2021). Political commitment analysis in the tuberculosis (TB) treatment program. *International Journal of Management and Humanities*, 5(7), 1-6. <https://doi.org/10.35940/ijmh.f1240.035721>
- Comfort, L. K., Boin, A., & Demchak, C. C. (2020). *Managing disaster resilience*. Routledge.
- Faghish Khorasani, H., & Faghish Khorasani, A. (2022). Predicting the impact of Internet of Things on the value added for the agriculture sector in Iran using mathematical methods. *Agris On-Line Papers in Economics and Informatics*, 14(3), 21-33. <https://doi.org/10.7160/aol.2022.140302>
- Filip, F. G. (2022). Collaborative decision-making: Concepts and supporting information and communication technology tools and systems. *International Journal of Computers, Communications & Control*, 17(2), 1-17. <https://doi.org/10.15837/ijccc.2022.2.4732>
- Heydari, N., & Morid, S. (2020). Water and agricultural policies in Iranian macro-level documents from the perspective of adaptation to climate change. *Irrigation and Drainage*, 69(4), 719-733. <https://doi.org/10.1002/ird.2498>
- Intergovernmental Panel on Climate Change. (2023). *Sixth assessment report*. IPCC.
- Maghrebi, M., Noori, R., Darougheh, F., Razmigir, R., Farnoush, H., Taherpour, H., Alavai, S. M. R., Araghi, A., Haghghi, A. T., & Kløve, B. (2021). Decline in Iran's river flows. *Research Square*. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-701372/v1>
- Post, C., De Smet, H., Uitdeewilligen, S., Schreurs, B., & Leysen, J. (2022). Participative or directive leadership behaviors for decision-making in crisis management teams? *Small Group Research*, 53(4), 421-456. <https://doi.org/10.1177/10464964221087952>
- Taheri, F. (2022). Decision-making in crisis situations: How do leaders manage scarce resources? *Journal of Resource Management and Decision Engineering*, 1(1), 17-22. <https://doi.org/10.61838/kman.jrmde.1.1.4>
- Yang, H., Seda, G., Sankar, V., Maves, R. C., Karanja, N., Parrish, J. S., Rosenberg, C., Goodman-Crews, P., Cederquist, L., Burkle, F. M., Tuteur, J. M., Leroy, C., & Koenig, K. L. (2020). Optimizing scarce resource allocation during COVID-19: Rapid creation of a regional health-care coalition and triage teams in San Diego County, California. *Disaster Medicine and Public Health Preparedness*, 14(6), 1-8. <https://doi.org/10.1017/dmp.2020.344>